



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 13 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, menyatakan bahwa *Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan selanjutnya dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Rancangan Perda, Rancangan Perkada dan/atau Peraturan DPRD dan bersifat wajib;*
 - b. bahwa dengan diterapkannya Aplikasi e-Perda oleh Kementerian Dalam Negeri, maka pengajuan peraturan gubernur untuk dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri harus memiliki dokumen perencanaan pembentukan peraturan gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Daftar Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 JANUARI 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 18 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 2 JANUARI 2023**TENTANG DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	ASAL PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Perubahan Atas Lampiran V Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
3.	Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
5.	Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
6.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	
7.	Pencabutan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Nusa Tenggara Timur	

8.	Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
9.	Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
10.	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	
11.	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	
12.	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.	Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur
14.	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
15.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
16.	Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



 W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



 R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT